

ABSTRAK

Abang Ansari, NIM 105251102722. ANALISIS AKAD KERJA SAMA PENGELOLAAN LAHAN MAPPATESANG. DALAM TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH DI KABUPATEN TAKALAR. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. dan Jasri, SE.Sy.,ME

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dikenal dengan istilah *mappatesang* di Desa Pa'rasangan Beru, Kabupaten Takalar, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih mu'amalah. Praktik *mappatesang* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang telah berlangsung secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan adat setempat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti ketidakjelasan akad, sistem bagi hasil, serta hak dan kewajiban para pihak, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik lahan, penggarap, serta pihak pemerintah desa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan praktik akad *mappatesang* yang terjadi di masyarakat serta dibandingkan dengan ketentuan akad mukhabarah dalam fiqih mu'amalah, meliputi rukun, syarat, dan prinsip keadilan dalam pembagian hasil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama *mappatesang* di Desa Pa'rasangan Beru pada dasarnya memiliki kesamaan dengan akad mukhabarah, namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fiqih mu'amalah. Beberapa unsur seperti kejelasan akad, sistem bagi hasil, serta penguatan kesepakatan secara tertulis masih perlu diperbaiki agar tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai akad mukhabarah yang sesuai syariat, tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga tercipta kerjasama yang adil, sah secara hukum Islam, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Mappatesang, Akad Mukhabarah, Fiqih Mu'amalah, Kerja Sama Pengelolaan Lahan, Bagi Hasil Pertanian

ABSTRACT

Abang Ansari, Student ID 105251102722. Analysis of the Mappatesang Land Management Cooperation Contract in the Perspective of Fiqh Mu'amalah in Takalar Regency. Study Program of Islamic Economic Law (Mu'amalah), Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar. Supervised by Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. and Jasri, S.E.Sy., M.E.

This study aims to analyze the practice of agricultural land management cooperation known as *mappatesang* in Pa'rasangan Beru Village, Takalar Regency, and to examine its conformity with the principles of *fiqh mu'amalah*. The *mappatesang* practice is a form of cooperation between landowners and cultivators that has been carried out for generations based on local customary traditions. However, in its implementation, several issues are still found, such as unclear contracts, profit-sharing systems, and the rights and obligations of the parties, which have the potential to create injustice and conflict.

This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving landowners, cultivators, and village government officials. The data were analyzed descriptively to describe the actual practice of *mappatesang* in the community and to compare it with the provisions of the *mukhabarah* contract in *fiqh mu'amalah*, including its pillars, conditions, and the principle of justice in profit-sharing.

The results of the study indicate that the *mappatesang* cooperation practice in Pa'rasangan Beru Village is essentially similar to the *mukhabarah* contract; however, it has not fully complied with the principles of *fiqh mu'amalah*. Several aspects, such as contract clarity, profit-sharing arrangements, and written agreements, still need improvement to prevent losses to either party. Therefore, efforts are needed to socialize and educate the community regarding *mukhabarah* contracts in accordance with Islamic law while preserving local wisdom, so that a fair, lawful, and sustainable cooperation can be achieved.

Keywords: Mappatesang, Mukhabarah Contract, Fiqh Mu'amalah, Agricultural Land Management, Profit-Sharing